

PANDUAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEREMPUAN

Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2013



18 SEPTEMBER 2013



PENGANTAR

"Pilih Walikota dan Wakil Walikota yang peduli kepentingan Perempuan" merupakan tema pendidikan politik perempuan Solidaritas Perempuan untuk Pemilihan Walikota tahun 2013. Tema ini menegaskan bahwa Solidaritas Perempuan ingin mendorong banyak perempuan untuk memilih calon yang selain memahami masalah perempuan dan berpihak pada perempuan. Dan tentu saja memiliki gagasan, program dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan, anak-anaknya, keluarganya dan komunitasnya. Bukan calon yang memiliki cara pandang patriarki (pandangan yang berorientasi pada laki-laki).

Pelajaran dari Pemilihan Walikota di berbagai tempat menunjukkan banyak calon Walikota tidak memiliki program konkret untuk menangani masalah strategis perempuan, yaitu: (1) masalah kemiskinan dan pemiskinan yang makin menghancurkan keberlanjutan kehidupan, (2) korupsi yang sudah menggerogoti biaya kesejahteraan rakyat termasuk biaya kesejahteraan perempuan, (3) berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, (4) berbagai bentuk kekerasan yang menghancurkan pluralisme dan menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan, (5) penegakan dan perlindungan hak azasi manusia dan hak-hak perempuan.

Hal ini mendorong munculnya kesadaran feminis di kalangan perempuan. Kesadaran feminis adalah kesadaran tentang situasi ketidakadilan yang bersumber pada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan maupun relasi kuasa modal, budaya, ilmu pengetahuan, hukum dan politik yang tidak adil. Dalam hal ini, perempuan menilai bahwa momentum Pemilihan Walikota Makassar 2013 tentu saja bukan sekedar sebuah pesta yang harus dimeriahkan dengan dukungan suara kepada calon yang peduli pada kepentingan perempuan. Tetapi juga merupakan upaya memperkuat posisi politik untuk ikut menentukan keputusan apa saja yang berkaitan dengan dirinya sebagai perempuan, dengan kehidupan anak-anak, keluarga, komunitas dan bangsanya.

Memilih calon Walikota yang peduli kepentingan perempuan diharapkan akan membuka ruang yang lebih luas bagi tercapainya suatu tatanan masyarakat yang adil bagi perempuan. Sebuah tatanan yang membebaskan perempuan dari belenggu stereotyping, diskriminasi, marginalisasi, dominasi, kekerasan, dan beban berlipat.

Buku ini merupakan buku panduan yang diadaptasi dari buku panduan pendidikan politik pilih perempuan yang digunakan pada kegiatan yang sama dalam pemilihan Walikota Makassar 18 September 2013.

Jakarta, Agustus 2013

Wahidah Rustam

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan



PENULIS:

Risma Umar
Wahidah Rustam
Hasmia Djalil
Jusmiati Lestari
Hijrah Lahaling

EDITOR:

Rio Ismail

ILUSTRATOR:

Deni Rodendo

LAYOUT:

Galih Gerryaldy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
BAGIAN I: PENDAHULUAN	1
1. Sekilas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar 2013	1
2. Mengapa Perempuan Bicara tentang Pemilihan Walikota Makassar	3
3. Mengapa Menggunakan Kerangka Analisis Gender	5
BAGIAN II: BAGAIMANA CARA MERUMUSKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR	9
BAGIAN III: BAGAIMANA CARA MEMBEDAH VISI-MISI-PROGRAM CALON WALIKOTA	13
BAGIAN IV: BAGAIMANA CARA MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR	17
BAGIAN V: BAGAIMANA CARA MEMANTAU KAMPANYE DAN PROSES PEMILIHAN WALIKOTA	19
1. Memantau Kecurangan Teknis Pelaksanaan Pemilu	19
2. Memantau Perilaku Kampanye yang Merugikan atau Melecehkan Perempuan	21
3. Memantau Politik Uang (Money Politik)	22
4. Memantau Penyalahgunaan Jabatan dan Fasilitas Negara	23
5. Memantau Komitmen tentang Pemenuhan Kepentingan Perempuan	24
6. Sejumlah Tindakan yang Diperlukan	24
BAB VI: BAGAIMANA BERSIKAP DAN BERTINDAK PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA	27
BAB VII: MEMANTAU PROSES KERJA WALIKOTA TERPILIH	29
1. Apa yang Harus Dipantau	29
2. Cara Menangani Hasil Pemantauan	31

pemilihan walikota Makassar 2013



mengapa perempuan bicara.....



menggunakan kerangka analisis gender.....



BAGIAN I: Pendahuluan

1. Sekilas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar 2013

PEMILIHAN Walikota Makassar Sulawesi Selatan akan berlangsung pada 18 September 2013. 10 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota akan bertarung memperebutkan dukungan 983, 990 suara warga kota Makassar yang tersebar di 2,300 TPS yang tersebar di 14 Kecamatan. Dari jumlah itu tercatat ada 480,855 pemilih laki-laki (48,87%) dan 503,135 pemilih perempuan (51,13%).

Sesuai nomor urut pasangan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Makassar, kesepuluh calon tersebut terdiri dari: Adil Patu-Isradi Zaenal (1), Supomo Guntur-Kadir Halid (2), Rusdin Abdullah- M Idris Patarai (3), Herman Handoko-Abd Latif Bafadhal (4), Erwin Kallo-Hasbi Ali (5), Tamsil Linrung-Das'ad Latif (6), Sitti Muhyina-M Syaiful Shaleh (7), M Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (8), Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah (9), dan Apiati K Amin Syam-H Zulkifli Gani Otto (10).

Dari 10 pasangan, enam pasang diantaranya didukung oleh partai politik, masing-masing:

1. Pasangan Adil Patu-Isradi Zaenal didukung Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
2. Pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid diusung Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

3. Pasangan Tamsil Linrung-Das'ad Latif diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Pasangan M Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal didukung Partai Demokrat (PD) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
5. Pasangan Irman Yasin Limpo-Busráh Abdullah didukung oleh satu partai, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN).
6. Pasangan Apiati K Amin Syam-H Zulkifli Gani Otto didukung partai-partai non parlemen yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Pelopor, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), PKBIB, Partai Kedaulatan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pemersatu Nasional (PPN), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Republikan.

Sedangkan empat pasangan calon lainnya maju sebagai calon independen, masing-masing:

7. Pasangan Rusdin Abdullah- M Idris Patarai
8. Pasangan Herman Handoko-Abd Latif Bafadhal
9. Pasangan Erwin Kallo-Hasbi Ali
10. Pasangan Sitti Muhyina-M Syaiful Shaleh.

Pemilukada kali ini merupakan pemilu dengan jumlah pasangan calon terbanyak dalam sejarah pemilihan walikota Makassar. Banyaknya pasangan calon sering dinilai oleh berbagai pihak sebagai wujud pertumbuhan semangat demokrasi di kota Makassar. Dalam artian bahwa warga kota Makassar sudah memiliki semangat dan

kemampuan untuk menentukan siapa yang layak dicalonkan sebagai pemimpin Makassar 5 tahun kedepan. Namun, jumlah dan penentuan calon dinilai lebih didasari pada kepentingan sejumlah elit politik untuk berkuasa, belum pada kepentingan masyarakat khususnya perempuan persoalan dan kepentingan perempuan marginal yang belum mencerminkan adanya kesadaran, keinginan dan kemampuan para calon Walikota untuk menjawab kebutuhan perempuan marginal.

2. Mengapa Perempuan Bicara tentang Pemilihan Walikota Makassar

APA manfaat pemilihan Walikota Makassar bagi perempuan? Pertanyaan ini selalu sulit dijawab oleh ratusan ribu pemilih perempuan atau lebih separuh dari jumlah pemilih. Bahkan pada tataran perempuan akar rumput atau perempuan marginal, pertanyaan seperti ini sering memunculkan keprihatinan. Betapa tidak, di tengah-tengah gempita kampanye 10 pasang kandidat calon Walikota, sosok perempuan marginal tidak menjadi pusat perhatian.

Pada pemilihan Gubernur Sulsel, kepentingan perempuan tidak banyak disebut-sebut oleh para kandidat. Sementara dalam penentuan Walikota Makassar, ada beberapa kandidat yang menyatakan berpihak pada perempuan, namun isu-isu perempuan bukanlah isu penting atau prioritas di mata para kandidat yang dapat dilihat dalam Visi dan Misi kandidat. Berdasarkan hasil pemetaan dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Anjing Mammiri, menunjukkan hingga saat ini banyak perempuan marginal di kota Makassar, terutama yang ada pada tataran akar rumput diperhadapkan dengan beberapa situasi dan persoalan yang serius, seperti:

- Pendidikan yang murah dan mudah dijangkau oleh perempuan marginal

- Layanan kesehatan yang murah dan mudah diakses, tanpa diskriminasi
- Banjir yang selalu mengancam pemukiman dan kesehatan warga
- Penanganan kemacetan dan penataan Jalan di kawasan kumuh
- Penyediaan lapangan kerja bagi perempuan dan penerapan standar upah buruh yang layak
- Penghancuran keberagaman dan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif
- Penggusuran kelompok miskin dan kelompok marginal lainnya baik tempat tinggal maupun tempat usaha atau sumber-sumber penghasilan mereka
- Layanan air bersih yang buruk dan makin mahal
- Listrik yang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin
- Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan (difabel, kelompok Lesbian, Bisex, Transgender, Intersex/LBTI, dll)

Karena itu pada pemilihan sejak Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Januari 2013 maupun Pemilukada Walikota Makassar September 2013, banyak perempuan yang menilai penting untuk berbicara tentang hubungan antara Pemilukada dengan kepentingan perempuan marginal. Mengapa demikian, karena pemerintah/Walikota Makassar adalah pihak yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan alokasi sumberdaya secara tepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingan perempuan marginal.

Selain itu, ada alasan lain yang memotivasi kalangan perempuan untuk berbicara, yaitu, jika tidak dipengaruhi dan dikendalikan, maka kekuasaan Walikota akan digunakan oleh berbagai pihak untuk pemenuhan kepentingan yang tidak berpihak pada kebutuhan perempuan marginal.

Upaya penting perempuan dalam momentum politik ini adalah melibatkan diri dalam pemilihan dan mengendalikan kekuasaan Walikota pada pasca pemilu. Sebab hanya dengan demikian, maka perempuan dapat mewujudkan hak atas kehidupan dan hak atas keberlanjutan kehidupannya. Dalam konteks kepentingan jangka panjang, keterlibatan ini diharapkan akan lebih membuka peluang bagi perempuan untuk:

- Memperoleh sumber-sumber kehidupan dan mendapatkan layanan negara untuk peningkatan kesejahteraan bersama secara proporsional.
- Mengaktualisasikan hak-hak dan peran-peran politiknya di wilayah publik
- Terlibat aktif didalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kekuasaan politik atau negara
- Dapat menggunakan hak dan kewenangannya untuk menentukan arah dan pemanfaatan sumber-sumber kehidupan, termasuk alokasi dana APBD, secara adil dan transparan

3. Mengapa Menggunakan Kerangka Analisis Gender

ANALISIS Gender digunakan untuk melihat sejauhmana arah kebijakan (visi-misi-program) calon Walikota Makassar diwarnai oleh keberpihakan terhadap kepentingan perempuan, yaitu kepentingan menciptakan tatanan sosial yang adil dan dilandaskan pada hubungan kuasa yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki. Analisis Gender akan menggunakan lima kerangka dasar analisis tentang ketidak-adilan terhadap perempuan, yaitu: (1) stereotipi atau *stereotyping*, (2) diskriminasi, (3) dominasi-subordinasi, (4) beban berlapis, dan (5) kekerasan.

Stereotipi

Stereotipi atau *stereotyping* adalah cara pandang yang melekatkan predikat atau identitas atau label atau sebutan tertentu kepada perempuan, seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan atau mengabaikan posisi dan keberadaan yang bersangkutan. Sebagai contoh: dalam proses pengelolaan pemerintahan, stereotipi muncul dalam bentuk kebijakan yang memosisikan perempuan sebagai “penunjang suami”. Atau perempuan sering diidentikkan dengan “usaha rumahan” atau “lemah lembut”.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan karena perempuan dianggap memiliki atribut atau identitas yang tidak dikehendaki. Contohnya: perempuan ditolak dalam suatu pekerjaan atau sengaja tidak dipromosikan untuk jabatan tertentu karena dia perempuan. Atau tidak boleh menjadi Ketua, Direktur atau pemimpin karena dianggap lebih memperhatikan keluarga ketimbang pekerjaan. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sering kali dikaitkan dengan diskriminasi atas dasar etnik, ras, agama, kepercayaan, budaya, hukum, dan politik. Terjadi pada hampir semua ruang kehidupan baik di kantor, sekolah, pasar, organisasi bahkan lembaga-lembaga publik lainnya.

Dominasi-Subordinasi

Dominasi-subordinasi adalah kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk menundukkan atau melemahkan perempuan. Contoh: perempuan harus menerima keputusan sepihak suami menjual tanah karena dia adalah istri. Atau, perempuan harus memilih pasangan calon Walikota tertentu karena suaminya mendukung pasangan tersebut.

Beban Berlapis

Beban ganda atau beban berlapis adalah status sekaligus beban nyata yang ditanggung oleh banyak perempuan dalam kehidupan sosial. Pada satu sisi perempuan adalah istri/ibu rumah tangga dan juga penjaga keberlanjutan keturunan suami (fungsi reproduksi). Tetapi pada sisi yang lain dia juga bertanggungjawab sebagai “tiang agama” dan “penjaga martabat” suami. Juga sebagai “pengaman kebutuhan” ekonomi keluarga apabila terjadi krisis ekonomi. Lalu menjadi “pihak pertama” yang terpapar pencemaran air dan udara atau “pihak terakhir” yang mengurus dampak banjir di rumah. Dalam kondisi seperti itu, perempuan masih diberi “kewajiban” oleh negara untuk merawat kehidupan sosial atau “mendidik dan merawat” anak-anak sebagai kader bangsa dan negara.

Kekerasan

Kekerasan merupakan cara atau alat yang mudah dikenali dan sangat efektif untuk meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak berdaya. Pada konteks kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, di mana yang selalu menjadi korban adalah perempuan. Kekerasan berbasis gender selalu muncul dalam beberapa kategori, diantaranya eksploitasi, kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan di wilayah publik, dan kekerasan oleh negara.

Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Makassar 2013, perempuan akan menggunakan analisis gender untuk melihat bagaimana Walikota mengakomodir kepentingan perempuan. Juga bagaimana cara, tindakan atau pola dan kebijakan (program) yang akan dikembangkan untuk merespon kepentingan tersebut. Termasuk cara yang digunakan untuk mengingkari, mengancam, bahkan mendominasi kepentingan perempuan baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan psikologis.

1. mendiskusikan persoalan ketidakadilan



2. menggali pengalaman perempuan



3. mendiskusikan lebih dalam



4. merumuskan kebutuhan perempuan

BAGAIMANA KANDIDAT MEMENUHINYA?



5. tahapan alur diskusi

BAGIAN II:

BAGAIMANA CARA MERUMUSKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR

APA kepentingan perempuan? Pertanyaan ini nampak sederhana namun sering kali membingungkan siapapun. Mengapa? Karena setiap orang termasuk perempuan sangat berbeda kepentingannya. Berbeda latar belakang masalah, berbeda latar belakang budaya, berbeda cara berikir, berbeda cara belajar, dan berbeda pengalaman.

Dalam menentukan kepentingan perempuan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendiskusikan bersama perempuan mengenai berbagai persoalan ketidakadilan yang mereka hadapi atau alami sehari-hari. Terutama terkait dengan masalah kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, perbaikan ekonomi, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, air bersih, keamanan, dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Sebagai bahan bandingan, gunakan rumusan 21 kategori kepentingan perempuan dan indikator pemenuhannya (*lihat lampiran*).

2. Galilah dari pengalaman perempuan, bagaimana prestasi pemerintah selama ini dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan. Kembangkan berbagai pertanyaan yang didasarkan pada lima (5) kategori ketidakadilan jender untuk menilai bagaimana situasi ketidakadilan yang dihadapi perempuan di tempat Anda, yaitu:
- Adakah pelabelan yang tidak adil (*stereotyping*) terhadap perempuan dan laki-laki di sekitar kita? Misalnya, adakah pandangan, sikap dan tindakan yang menilai perempuan “hanya sebagai pelayan keluarga” atau menilai laki-laki “hanya sebagai pemimpin”?
 - Adakah pembedaan yang tidak adil (*diskriminasi*) terhadap perempuan dan laki-laki? Misalnya, “perempuan tidak perlu ikut rapat” karena “yang berhak ikut rapat adalah laki-laki” sebagai pemimpin didalam rumah tangga. Atau adakah kesempatan dan jaminan bagi perempuan untuk mendapatkan manfaat langsung dari pelayanan sosial oleh negara atau pemerintah (tidak dipinggirkan atau *dimarginalisasi*)?
 - Adakah jaminan dan perlakuan bagi perempuan untuk bisa berkembang secara mandiri sehingga mampu berbagi dengan laki-laki (tidak *didominasi/di-sub-odominasi* atau dikuasai)?
 - Adakah jaminan dan perlakuan yang tidak memberikan *pembebanan berlapis(multiple burden)* terhadap perempuan? Misalnya tidak memperlakukan perempuan untuk mengurus semua hal: penerus keturunan, pekerja didalam rumah, pemelihara kehidupan sosial, pemelihara keberlanjutan negara, penjaga kemurnian agama, pengaman krisis ekonomi, dan pihak pertama yang bersentuhan dengan pencemaran lingkungan.

- Adakah jaman dan perlakuan bagi perempuan untuk bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, bebas dari kekerasan negara, dan bebas dari ancaman premanisme?
3. Diskusikan lebih dalam dan temukan apa dampak ketidakadilan tersebut terhadap perempuan. Lalu gali lebih dalam dan temukan apa akar masalah ketidakadilan tersebut. Jika ada kesulitan, lakukan diskusi sekali lagi hingga peserta diskusi bisa merumuskan apa masalah, kebutuhan dan kepentingan utama perempuan.
 4. Tuliskan rumusan kebutuhan dan kepentingan perempuan, lalu diskusikan bagaimana kemungkinan para kandidat calon Walikota Makassar bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan perempuan.
 5. Alur diskusi di tingkat kampung maupun diskusi yang membahas kepentingan perempuan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pembukaan
 - Penjelasan maksud dan tujuan
 - Perkenalan
 - Pembahasan Materi Diskusi:
 - a. Menggali masalah dan kepentingan perempuan
 - b. Melakukan analisis gender untuk melihat keterkaitan kepentingan dengan visi dan misi para kandidat Walikota
 - c. Membahas sistem dan tahapan Pemilukada Walikota
 - d. Membahas pemantauan Proses Pemilukada Walikota
 - Kesimpulan
 - Penutup

CARA MEMBEDAH VISI MISI PROGRAM CALON WALIKOTA



1. pastikan memahami dasar ketidakadilan gender



2. menggunakan rumusan kebutuhan sebagai titik tolak



3. mengamati visi misi program kandidat

4. mendiskusikan femuan dengan kelompok perempuan



BAGIAN III:**BAGAIMANA CARA MEMBEDAH
VISI-MISI-PROGRAM
CALON WALIKOTA**

SAAT ini ada enam pasang kandidat Walikota Makassar yang diusung partai-partai politik dan empat pasang lainnya merupakan calon non partai politik (independen), yang juga memiliki latar belakang yang berbeda-besa. Bagaimana membedah visi-misi-program mereka? Ini pertanyaan yang sulit. Sebab hingga kini tak ada informasi yang jelas mengenai hal ini. KPU sendiri belum mempublikasikan dokumen resmi mengenai visi dan misi Kandidat. Sesuai jadwal di KPU, dokumen tersebut baru akan disampaikan secara resmi oleh para kandidat pada tanggal 1 September 2013.

Penjadualan seperti ini sebetulnya merugikan kepentingan masyarakat. Sebab jika melihat pelaksanaan pemungutan suara yang akan berlangsung pada 18 September, maka berarti perempuan hanya punya kesempatan yang pendek, yaitu 17 hari untuk bisa memahami

visi dan misi para kandidat. Hal seperti ini bisa saja bisa berakibat kalangan perempuan marginal tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara kritis.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membedah atau mendiskusikan visi-misi-program para kandidat calon Walikota:

1. Pastikan bahwa kita sudah memahami enam ukuran dasar yang sering digunakan banyak untuk menilai ketidakadilan gender, yaitu: pelabelan (*stereotyping*), pembedaan secara tidak adil (diskriminasi), peminggiran (marginalisasi), penguasaan dan pengendalian (dominasi-subordinasi), pembebanan berlapis, dan kekerasan.
2. Gunakan rumusan kebutuhan atau kepentingan perempuan sebagai titik-tolak untuk melihat atau menilai apakah visi-misi-program para kandidat berpihak pada kepentingan perempuan (*lihat contoh daftar kategori kepentingan dan ukuran pemenuhan kepentingan perempuan*).
3. Bacalah dokumen visi-misi-program kandidat atau amati pemberitaan di media cetak, radio atau TV maupun media poster/baliho dan bahan publikasi lainnya. Jangan lupa mengamati kampanye kandidat, dan perhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ada tidaknya informasi yang lengkap dan memudahkan perempuan untuk mengetahui atau memahami tahapan pemilihan maupun substansi program para kandidat.
 - b. Ada tidaknya kesungguhan memasukkan aspek-aspek dasar kepentingan perempuan didalam program, mulai dari perencanaan, implementasi dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- c. Ada tidaknya rencana kebijakan pemerintahan yang terukur dan bisa menjamin pemenuhan kepentingan perempuan (*lihat kategori kepentingan perempuan yang terlampir*).
 - d. Ada tidaknya upaya proaktif untuk mempromosikan isu-isu, gagasan, strategi, cara pendekatan, model atau profile orang/kelompok atau kebijakan pro keadilan gender yang memudahkan upaya mempercepat penanganan masalah ketidakadilan gender.
 - e. Ada tidaknya penghargaan khusus bagi pihak-pihak yang bisa mengintegrasikan kepentingan keadilan gender didalam penanganan masalah ketidakadilan gender di berbagai tingkatan pemerintahan. Perhatikan siapa saja kandidat calon Walikota yang menunjukkan kedekatan dengan kepentingan perempuan di sekitar Anda. Jika perlu, berikan skor/angka tertentu untuk menunjukkan peringkat calon yang peduli/punya kedekatan hingga yang tidak peduli atau tidak punya kedekatan dengan kebutuhan/kepentingan perempuan.
4. Diskusikan temuan Anda dengan kelompok-kelompok perempuan di sekitar Anda, dan temukan kesimpulan serta sikap bersama. Proses seperti ini akan memudahkan perluasan pemahaman dan penyamaan kepentingan antar sesama perempuan.

CARA MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN



1. catat dan publikasikan



2. berbicara pada lebih banyak orang



3. sampaikan hasil rumusan secara langsung



4. negosiasi dan komitmen kandidat



5. cari dukungan sebanyak mungkin

BAGIAN IV:

BAGAIMANA CARA MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR

ADA banyak cara yang bisa dilakukan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan selama proses pemilihan. Cara-cara ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok, antara lain:

1. Catat dan publikasikan rumusan kepentingan perempuan kepada sesama perempuan lainnya atau sampaikan kepada media massa atau simpul media sosial untuk disebarluaskan kepada publik di berbagai tempat.
2. Berbicaralah kepada lebih banyak orang mengenai apa yang dirasakan, dilihat, dan didokumentasikan.
3. Sampaikan hasil rumusan tersebut secara langsung ke kandidat calon atau melalui tim sukses kandidat.
4. Jika diperlukan, lakukan negosiasi dan tekanan oleh banyak kelompok perempuan agar pada kandidat mau mendiskusikan dan bersedia memenuhi kebutuhan perempuan pada saat mereka terpilih. Apabila memungkinkan, mintalah para kandidat membuat komitmen tertulis untuk memperjuangkannya pada saat berkuasa.
5. Carilah dukungan sebanyak mungkin perempuan maupun laki-laki agar tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan/kepentingan perempuan disuarakan oleh banyak orang.

CARA MEMANTAU KAMPANYE DAN PROSES PEMILIHAN WALKOTA

1. memantau kecurangan teknis



2. memantau prilaku kampanye



prioritas saya memenuhi kepentingan perempuan

5. memantau komitmen



6. tindakan yang diperlukan



BAGIAN V:

BAGAIMANA CARA MEMANTAU KAMPANYE DAN PROSES PEMILIHAN WALIKOTA

1. Memantau Kecurangan Teknis Pelaksanaan Pemilu

Ada sejumlah tahapan dalam teknis pelaksanaan pemilihan Walikota yang perlu dipantau:

- a. **Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu:**
Perhatikan jangan sampai ada kemungkinan terjadi manipulasi data jumlah penduduk potensial pemilih. Misalnya, pencantuman data tanpa melakukan pendataan ulang dengan metoda sensus.
- b. **Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS):**
Perhatikan jangan sampai terjadi kecurangan dalam bentuk data pemilih ganda atau pemilih kadaluwarsa (meninggal dunia, tidak memiliki hak pilih, sakit jiwa atau berubah status profesi menjadi anggota militer/polisi, atau penduduk musiman yang difasilitasi pejabat setempat).

- c. **Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT):**
Perhatikan jangan sampai terjadi kecurangan seperti pada pengumuman DPS.
- d. **Undangan/Pemberitahuan Kepada calon Pemilih:**
Perlu dicek silang kepada sesama perempuan jangan sampai ada calon pemilih secara sengaja yang tidak diberi undangan/pemberitahuan untuk memilih.
- e. **Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS):**
Perhatikan jangan sampai ada penambahan jumlah TPS fiktif atau penggabungan TPS yang berpotensi menghilangkan suara calon pemilih.
- f. **Pendistribusian Kelengkapan Logistik Pemilu (Kotak Suara, Surat suara, Formulir C1, dll):**
Perhatikan jangan sampai terjadi penambahan surat suara yang tidak tercatat atau ada keterlambatan distribusi surat suara ke TPS di masing-masing tempat.
- g. **Kecurangan pada saat Kampanye:**
Perhatikan jangan sampai ada kekerasan atau “skenario kerusuhan” atau cara-cara lainnya yang menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan untuk ikut kampanye. Juga perhatikan kemungkinan adanya politik uang atau “kampanye negatif” atau “kampanye hitam” dan pengerahan masa yang bisa merugikan kepentingan perempuan.
- h. **Pemungutan Suara:**
Perhatikan jangan sampai ada pemilih ganda, kertas suara yang telah dicontreng terlebih dahulu atau rusak, pemilih yang tidak terdaftar atau calon pemilih yang pindah mendadak.
- i. **Perhitungan Suara:**
Perhatikan jangan sampai ada penghitungan suara secara tidak sah, manipulasi Formulir C1 dan DA.

- j. Pengiriman Surat Suara/Kotak Suara Hasil Pemungutan/Perhitungan Suara dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

Perhatikan jangan sampai terjadi manipulasi atau penggantian kertas suara atau pengrusakan surat dan kotak suara.

- k. Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh PPK:

Perhatikan jangan sampai terjadi manipulasi formulir DA dan Berita Acara.

- l. Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh KPU Kota:

Perhatikan jangan sampai terjadi manipulasi formulir DB dan Berita Acara.

2. Memantau Perilaku Kampanye yang Merugikan atau Melecehkan Perempuan

- a. Bacalah dokumen visi-misi-program kandidat atau amati pemberitaan di media cetak, radio atau TV maupun media poster/baliho maupun komunikasi lisan selama kampanye. Perhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- Ada tidaknya sikap atau tindakan bias gender atau ucapan, sikap, tindakan atau penggunaan simbol, bahasa, gambar yang melecehkan perempuan. Misalnya penggunaan kata-kata: *"montok, menggairahkan, mempesona, bibir seksi, dan bodi aduhai"*.
- Ada tidaknya penggunaan simbol atau kata atau kalimat yang melebihkan laki-laki dari perempuan, antara lain: *"laki lebih mandiri, tangguh, kuat, berpikir logis, lebih bertanggungjawab, jujur, dan lebih bermoral"*.

- Ada tidaknya penggunaan idiom atau penggambaran dengan kalimat, gambar, rekaman gambar, foto atau sketsa atau grafis yang memperkuat enam kategori ketidakadilan gender yaitu stereo typing, diskriminasi, dominasi, sub-ordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban berlapis terhadap perempuan.
- b. Cermati apakah sebelum dan selama masa kampanye maupun saat minggu tenang atau menjelang hari H terjadi hal-hal sebagai berikut:
- Ada atau tidak ada mobilisasi dukungan dengan menggunakan cara-cara patriarki, misalnya menggunakan para suami untuk membujuk atau memaksa istri dan anak-anak memilih pasangan tertentu.
 - Ada atau tidak ada upaya memberikan informasi yang bohong/tidak benar untuk tujuan menyesatkan pemilih perempuan

3. Memantau Politik Uang (*Money Politik*)

- a. Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai bentuk tindakan politik uang (*money politic*) seperti yang dimaksud pada pasal 117 ayat 2 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah".
- b. Perhatikan berbagai modus politik uang yang bisa ditemukan di sekitar wilayah kerja masing-masing, antara lain:
- Pembagian uang secara langsung,

- Pemberian sembako
- Pengobatan gratis
- Pembagian doorprize dan undian
- Pemberian alat ibadah (sarung, mukena dll)
- Pemberian material bangunan (semen, pasir besi dll)
- Pemberian asuransi
- Pemberian uang di majlis taklim, masjid dan gereja
- Liburan dan tamasya gratis
- Pemberian ambulans (untuk warga RT/RW)
- Pemberian beasiswa
- Pemberian raskin
- Dan tindakan lainnya yang memenuhi unsur yang dimaksud pada pasal

4. Memantau Penyalahgunaan Jabatan dan Fasilitas Negara

- a. Cermati pelaksanaan pasal 79 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 yang melarang pelibatan hakim pada semua peradilan; pejabat BUMN/ BUMD; pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; dan kepala desa, didalam kampanye Pemilukada.
- b. Cermati pelaksanaan pasal 79 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 yang melarang pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menggunakan fasilitas Negara dalam melaksanakan kampanye. Juga larangan melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (ayat 4).

5. Memantau Komitmen tentang Pemenuhan Kepentingan Perempuan

Cermati apakah selama masa kampanye para kandidat maupun tim suksesnya benar-benar menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya penyampaian komitmen untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan perempuan.
- b. Ada tidaknya penyampaian prioritas strategi yang terkait dengan pemenuhan kepentingan perempuan.

6. Sejumlah Tindakan yang Diperlukan

Apabila selama pemantauan terhadap semua tahapan pemilihan terdapat berbagai kecurangan, penyimpangan atau tindakan yang merugikan kepentingan perempuan, sebaiknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kumpulkan, catat dan simpanlah bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan dengan: apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana.
- b. Jika berkaitan dengan politik uang, kumpulkan bukti-bukti menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - Apa Kasus Politik uangnya? (*Misal : Pemberian sembako dalam kampanye*)
 - Kapan terjadinya? (*Hari, tanggal, jam*)
 - Siapa yang melakukan (*calon Walikota/tim sukses/partai/relawan*)
 - Dimana Tempat kejadiannya? (*tempat saat kejadian*)
 - Jelaskan bagaimana kejadiannya? (*Misalnya, seorang anggota*)

tim sukses membagi-bagikan sembako kepada warga yang terkena banjir)

- Apa buktinya? (*satu bungkus paket Sembako*)
- c. Gunakan buku catatan untuk menuliskan kejadian atau gunakan seluler (*handphone*) untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video seluler.
- d. Sampaikan temuan ke SMS Center Solidaritas Perempuan. Atau, jika berminat, bisa disampaikan pada khalayak luas melalui media massa atau melalui media jejaring sosial, bahkan melalui berbagai diskusi atau pertemuan tatap muka yang melibatkan lebih banyak orang.
- e. Laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) apabila ada pelanggaran hukum oleh para kandidat atau tim sukses kandidat.
- f. Jika diperlukan, galang kekuatan sesama perempuan untuk memberikan sanksi sosial dalam bentuk “anjuran tidak memilih” kandidat yang dengan sengaja merugikan atau mengabaikan kepentingan perempuan.

BERSIKAP DAN BERTINDAK PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA



memilih calon yang benar-banar dipercaya



tunjukkan keberanian memberi sanksi terhadap calon yang membohongi dan tidak peduli

BAB VI:

BAGAIMANA BERSIKAP DAN BERTINDAK PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

BAGI perempuan, memilih kandidat calon adalah sikap politik yang akan menentukan masa depannya, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Tidak banyak yang harus dilakukan pada saat pemungutan suara, terkecuali meyakinkan diri sendiri bahwa:

"...memilih adalah hak, dan sebaik-baik penggunaan hak pilih adalah memilih hanya calon yang benar-benar dipercaya dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan..."

Atau,

"...tunjukkan keberanian untuk memberi sanksi terhadap calon yang membohongi dan tidak peduli pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Galang dukungan sesama perempuan untuk memboikot atau tidak memilih calon yang bersangkutan..."

MEMANTAU PROSES KERJA WALIKOTA TERPILIH

1. apa yang harus dipantau



2. menangani hasil pemantauan



komunikasi dengan walikota terpilih



menyampaikan informasi kepada media

KAMI MENDAPAT INFORMASI BAHWA GUBERNUR TERPILIH...

INI UNTUK MENINGGATKAN WAKOTA

melakukan aksi

AKSI DAMAI

MANA JAWABNYA?

KEPENTINGAN PEREMPUAN

?



BAB VII:

MEMANTAU PROSES KERJA WALIKOTA TERPILIH

1. Apa yang Harus Dipantau

Setelah proses pemilihan Walikota, penting bagi perempuan untuk memastikan sejauhmana Walikota terpilih menjalankan program-program yang dijanjikan ketika berkampanye. Misalnya, program penanganan banjir, penanganan macet, biaya kesehatan perempuan, dan sebagainya, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dilahirkan menjawab kebutuhan perempuan di Kota Makassar.

Adapun aspek-aspek penting pada pasca pemilihan yang perlu dipantau secara terus menerus oleh masyarakat, khusus perempuan di Kota Makassar, adalah:

- a. **Kebijakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah):**
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu komponen yang penting untuk dipantau. Tidak hanya untuk

memastikan terjadinya transparansi, tetapi juga memastikan bahwa APBD dialokasikan untuk kebutuhan atau kepentingan perempuan. Adapun hal yang penting dilihat dan dianalisa terkait dengan APBD, yaitu:

- Bacalah dan cermati, Apakah APBD yang dianggarkan sesuai kepentingan atau kebutuhan perempuan
- Bandingkan berapa persentase anggaran yang diperuntukan bagi pemerintah daerah, Walikota, maupun bagi masyarakat, khususnya anggaran bagi perempuan.
- Apa saja komponen APBD yang diperuntukan bagi kebutuhan atau kepentingan perempuan.
- Penganggaran detail dapat dilihat di dalam buku induk APBD, dan tidak dapat dilihat didalam dokumen ringkasan APBD yang biasanya dibagikan ke publik.

b. Keputusan-Keputusan dan Program Prioritas Walikota Terpilih:

Program prioritas Walikota serta keputusan-keputusan merupakan hal yang penting untuk dipantau, sehingga dapat menjawab kebutuhan atau kepentingan perempuan. Adapun hal-hal yang penting untuk dipantau terkait program dan keputusan-keputusan Walikota terpilih adalah:

- Sejauhmana keputusan yang dilahirkan Walikota terpilih bermanfaat bagi perempuan
- Melihat program yang direncanakan dan dilaksanakan, apakah sesuai atau tidak dengan janji ketika kampanye.
- Pastikan bahwa keputusan-keputusan dan program yang direncanakan tidak diskriminatif terhadap perempuan.
- Pastikan bahwa perempuan terlibat dalam proses pengambilan

keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

- Pastikan apa saja jenis program yang direncanakan oleh Walikota terpilih khusus bagi kebutuhan/kepentingan perempuan.
- Pastikan apakah program atau keputusan tersebut benar-benar memenuhi tuntutan atau kepentingan yang disampaikan perempuan.

2. Cara Menangani Hasil Pemantauan

Ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menindak-lanjuti hasil pemantauan terhadap pemenuhan kepentingan perempuan:

a. Lakukan Komunikasi dengan Walikota Terpilih untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan situasi atau masalah yang dihadapi dan kepentingan perempuan
- Meminta pemerintah menyediakan informasi yang terbuka, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya perempuan.
- Menyediakan media, saluran komunikasi, dan mekanisme yang memudahkan perempuan untuk menyampaikan keluhan mereka.
- Memastikan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Walikota tidak mengandung unsur ketidakadilan gender, seperti mengandung unsur pelecehan, contohnya pernyataan bahwa "*pemeriksaan terjadi akibat perempuan menggunakan rok seksi*"; dan sebagainya.

b. Diskusi Bersama Lintas Kelompok Perempuan:

Berdiskusi bersama perempuan merupakan sebuah cara untuk hasil pemantauan bersama dan menentukan strategi bersama strategi

dalam mengefektifkan pemantauan dan mengadvokasi temuan terhadap kinerja Walikota terpilih.

c. **Menyampaikan Informasi kepada Media:**

Catatan temuan-temuan dari hasil pemantauan, baik dari aspek penganggaran, keputusan-keputusan, program, maupun cara berkomunikasi Walikota terpilih, penting untuk disampaikan ke Media. Sebab hanya dengan demikian, masyarakat luas dapat mengetahui apakah Walikota terpilih melaksanakan janji-janji yang pernah disampaikan ketika berkampanye. Atau sebaliknya justru tidak kehadirannya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat khususnya perempuan.

d. **Melakukan Aksi-Aksi Mengingatkan Walikota:**

Untuk mengingatkan kandidat terpilih atas janji-janji program yang dilakukan ketika masa kampanye, juga perlu dilakukan aksi-aksi bersama untuk mengingatkan kembali Walikota terpilih untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan perempuan.

Solidaritas Perempuan

Jl. Siaga II No.36 Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510-Indonesia

Telp: (62-21) 79183108,79181260

Fax: (62-21) 7981479

Email: soliper@centrin.net.id

Website: www.solidaritasperempuan.org